

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang disampaikan ini memiliki makna yang penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah. LKPJ Gubernur Jambi pada tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Hasil dari pelaksanaan pembangunan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2015 didukung oleh APBD Provinsi Jambi dan APBN termasuk dana Dekonsentrasi, dan dana Tugas Pembantuan.
- 2) Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2015 yang di dukung oleh APBD Provinsi Jambi sebesar Rp3.734.034.470.675,92 dengan tingkat realisasi sebesar 91,76 persen. Jumlah APBD tersebut diperoleh dari pendapatan daerah sebesar Rp3.259.508.046.034,99 dan dari sumber penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp474.526.424.640,93.
- 3) Pendapatan daerah diperoleh dari tiga sumber pendapatan utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1.253.624.335.381,67 dan terealisasi sebesar Rp1.242.250.309.352,90 atau 99,09 persen. Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan dengan target sebesar Rp1.527.551.544.653,32, dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp1.419.079.798.364,00 atau sebesar 92,90 persen, dan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp478.332.166.000,00 milyar dengan capaian realisasi sebesar Rp474.622.781.216,00 atau 99,22 persen.

- 4) Pada sisi belanja daerah tahun anggaran 2015 dialokasikan sebesar Rp3.734.034.470.675,92 dan terealisasi sebesar 91,76 persen atau sejumlah Rp3.426.404.162.232,97. Jumlah tersebut dipergunakan untuk belanja tidak langsung dengan proporsi alokasi sebesar 51,12 persen dari total belanja daerah atau dianggarkan sebesar Rp1.908.695.340.699,83 dan terealisasi Rp1.762.750.171.091,00 atau setara dengan 92,35 persen. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp1.825.339.129.976,09 dan terealisasi sebesar Rp1.663.653.991.141,97 atau setara dengan 91,14 persen, proporsi alokasi belanja langsung sebesar 48,88 persen dari total belanja daerah.
- 5) Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2015 yang diukur dari kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 4,21 persen, melambat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang bertumbuh sebesar 7,35 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar 0,22 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 11,02 persen. Jika dilihat berdasarkan harga berlaku maka PDRB tahun 2015 meningkat sebesar Rp1,25 triliun atau mencapai Rp155,11 triliun dari Rp153,86 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tersebut didukung oleh semua sektor ekonomi. Sedangkan laju inflasi Kota Jambi pada tahun 2015 berada pada posisi 1,37 persen yang terjadi pada semua kelompok barang dan jasa.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun untuk memenuhi kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD Provinsi Jambi dan juga sebagai informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintah daerah, sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya jika dalam penyajian LKPJ Tahun Anggaran 2015 ini masih terdapat kurang cermatan dan kurang telitian, maka akan diperbaiki dan disempurnakan setelah mendapat masukan, saran dan kritikan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Sidang Paripurna, Sekian, Terima kasih.

Jambi, Maret 2016

GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI